



Penegakan Hukum Konflik Sosial Dalam Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia

Firwanda Sandi Pradipta¹, Trubus Rahadiansyah², Maya Indrasti Notoprayitn³

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: firwandasandi19@gmail.com

Article received: 01 Mei 2025, Review process: 07 Mei 2025

Article Accepted: 26 Mei 2025, Article published: 31 Mei 2025

ABSTRACT

The phenomenon of conflict between mass organizations in Indonesia, especially in Jambi Province, is a serious challenge that has the potential to disrupt national stability and hinder the development process. Social conflicts that arise due to differences in interests, values, and cultural backgrounds within mass organizations need to be addressed through comprehensive and responsive policies. This research aims to analyze the Indonesian government's policies in handling conflicts between mass organizations and evaluate the application of the Gender Equality and Social Inclusion (GESI) approach in post-conflict recovery. Using a qualitative method based on document study, this research examines laws and regulations, policy reports, and related literature to understand conflict dynamics and government strategies implemented through Bakesbangpol as the main actor. The results show that government policies have accommodated two approaches, namely preventive and repressive, which include dialogic, mediation and reconciliation. However, the implementation of GESI in post-conflict handling is still not optimal and requires strengthening, especially in terms of social rehabilitation and reconstruction that is sensitive to the needs of women and other vulnerable groups. This research recommends the importance of strengthening the capacity of the apparatus, mainstreaming the value of restorative justice, and actively involving the community and mass organizations as an effort to create a more inclusive and socially just conflict management system. Thus, it is hoped that conflict management between mass organizations can support the creation of sustainable social harmony and national development that is oriented towards common welfare.

Keywords: Inter-organization Conflict, GESI, Bakesbangpol, Restorative Justice

ABSTRAK

Fenomena konflik antar organisasi massa (ormas) di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi, menjadi tantangan serius yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan menghambat proses pembangunan. Konflik sosial yang muncul akibat perbedaan kepentingan, nilai, dan latar belakang budaya dalam ormas perlu ditangani melalui kebijakan yang komprehensif dan responsif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani konflik antar ormas serta mengevaluasi penerapan pendekatan Gender Equality and Social Inclusion (GESI) dalam pemulihan pascakonflik. Menggunakan metode kualitatif berbasis studi dokumen, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, laporan kebijakan, dan literatur terkait untuk memahami dinamika konflik serta strategi pemerintah yang diimplementasikan melalui

Bakesbangpol sebagai aktor utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah mengakomodasi dua pendekatan, yaitu preventif dan represif, yang meliputi dialogis, mediasi, dan rekonsiliasi. Namun, implementasi GESI dalam penanganan pascakonflik masih belum optimal dan membutuhkan penguatan, khususnya dalam hal rehabilitasi sosial dan rekonstruksi yang sensitif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lainnya. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan kapasitas aparat, pengarusutamaan nilai keadilan restoratif, serta pelibatan aktif masyarakat dan ormas sebagai upaya untuk menciptakan sistem penanganan konflik yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan konflik antar ormas dapat mendukung terciptanya harmoni sosial yang berkelanjutan dan pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Kata Kunci: Konflik Antar Ormas, GESI, Bakesbangpol, Keadilan Restoratif

PENDAHULUAN

Organisasi masyarakat merupakan wadah sosial yang dibentuk secara sukarela oleh individu-individu berdasarkan kesamaan aktivitas, profesi, atau tujuan tertentu, baik berbadan hukum maupun tidak. Keberadaan ormas menjadi sarana partisipatif yang sangat penting dalam pembangunan bangsa, karena manusia sebagai makhluk sosial cenderung membentuk organisasi untuk mewujudkan tujuan bersama yang sulit dicapai secara individual. Namun, dalam praktiknya, dinamika kehidupan berorganisasi sering memunculkan konflik sebagai konsekuensi dari interaksi sosial yang kompleks. Sebagaimana dijelaskan oleh Robert Edelman, Henry L. Tosi, dan Neal P. Mero, konflik dalam organisasi dapat dipicu oleh perbedaan karakter individu, kondisi situasional, dan kondisi keorganisasian. Pemahaman akan konflik ini juga dapat diperluas melalui teori mobilisasi, yang menekankan bahwa potensi konflik dapat dipicu dan dimobilisasi dalam suatu organisasi sosial.

Konflik sosial sendiri adalah benturan yang terjadi antara dua kelompok masyarakat atau lebih, yang sering disertai dengan kekerasan, berdampak luas, dan memiliki potensi untuk mengganggu stabilitas nasional. Konflik seperti ini dapat menghambat pembangunan yang berkelanjutan, terutama jika tidak ditangani dengan langkah-langkah yang sistematis dan terencana. Di Provinsi Jambi, misalnya, pada tahun 2009 tercatat sebanyak 1.008 organisasi masyarakat dengan berbagai jenis, seperti LSM dan yayasan. Jumlah yang besar ini membuka kemungkinan terjadinya konflik, baik antarormas maupun internal, yang jika tidak diselesaikan dengan baik dapat meluas menjadi konflik sosial yang lebih serius dan berimplikasi pada proses pembangunan nasional.

Dalam konteks inilah, penting untuk merumuskan metode dan strategi penyelesaian konflik yang efektif, agar konflik yang muncul di lingkungan ormas tidak menimbulkan keresahan sosial yang lebih besar. Ormas memiliki peran strategis dalam memberikan evaluasi terhadap kinerja pemerintah, di luar fungsi yang dijalankan oleh parlemen dan partai politik. Untuk menjaga keberlanjutan peran ormas, penting memastikan akses dan partisipasi yang setara bagi semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, dalam pengambilan keputusan dan penerimaan manfaat pembangunan. Pendekatan Gender Equality and Social

Inclusion (GESI) menjadi salah satu strategi yang sangat diperlukan untuk memanajemen konflik dalam ormas agar lebih berkelanjutan, adil, dan inklusif.

Pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial merupakan pendekatan penting dalam mengurangi ketimpangan dan memastikan keadilan sosial. Pendekatan ini perlu didukung oleh kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang melibatkan ormas sebagai mitra strategis. Isu-isu seperti perlindungan anak dan penyandang disabilitas perlu menjadi bagian dari peran serta ormas dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Mengingat tingginya potensi konflik antar ormas, khususnya di wilayah dengan keberagaman tinggi seperti Jakarta, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merancang dan melaksanakan strategi penanganan konflik yang tepat. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang menekankan bahwa penanganan konflik mencakup langkah-langkah sistematis, mulai dari pencegahan, penghentian, hingga pemulihan pasca-konflik.

Dalam konteks nasional, integrasi dan manajemen konflik antar ormas menjadi salah satu tugas utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di tingkat nasional maupun daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 menetapkan Bakesbangpol sebagai sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Sebagai koordinator lintas sektor, Bakesbangpol memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanganan konflik, termasuk pencegahan, penghentian, dan pemulihan konflik antar ormas, sehingga dapat menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif bagi pembangunan.

Peneliti memandang bahwa peran Bakesbangpol sangat strategis dalam berinteraksi langsung dengan ormas, terutama dalam menghadapi potensi konflik yang terjadi. Sebagai lembaga yang bertugas dalam kewaspadaan nasional, pembinaan ideologi, penguatan wawasan kebangsaan, serta pemantauan dan penanganan konflik, Bakesbangpol memiliki kapasitas signifikan untuk memfasilitasi dan merespons berbagai persoalan sosial. Penelitian ini difokuskan pada Provinsi Jambi, yang secara geografis terletak di jalur lintas Sumatera dan memiliki kompleksitas sosial-budaya yang rentan terhadap konflik, termasuk di kalangan ormas yang kerap mengalami perpecahan internal maupun eksternal.

Sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, Bakesbangpol memiliki peran vital dalam menciptakan situasi yang kondusif untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Lembaga ini juga mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan yang ada mengatur penyelesaian konflik antar ormas di Indonesia, memetakan bentuk-bentuk konflik yang terjadi di Provinsi Jambi, dan mengidentifikasi faktor-faktor utama penyebab konflik tersebut. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi solusi yang lebih tepat sasaran, sehingga dapat

memperkuat manajemen konflik berbasis keadilan sosial dan inklusi yang lebih berkelanjutan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi dokumen sebagai pendekatannya. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam fenomena yang terjadi, seperti dinamika konflik antar organisasi massa (ormas) serta kebijakan pemerintah dalam penanganan konflik tersebut. Penelitian ini akan berfokus pada pengumpulan data melalui analisis dokumen yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, laporan kebijakan pemerintah, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelesaian konflik sosial di Indonesia. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dan penanganan konflik, serta mengevaluasi efektivitas penerapan kebijakan berbasis Gender Equality and Social Inclusion (GESI) dalam menyelesaikan konflik dan pemulihan pasca-konflik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Konflik Antar Organisasi Massa (Ormas)

Konflik sosial merupakan perseteruan atau benturan fisik yang disertai kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih dalam jangka waktu tertentu yang berdampak luas terhadap ketidakamanan dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat proses pembangunan. Penyebab utama dari konflik sosial antara lain adalah perbedaan pendirian dan perasaan individu yang semakin tajam, perubahan sosial yang berlangsung terlalu cepat sehingga menimbulkan disorganisasi, serta adanya perbedaan kebudayaan yang memengaruhi pola pikir dan perilaku dalam suatu kelompok. Selain itu, konflik juga dapat timbul akibat benturan kepentingan, baik secara individu maupun kelompok, seperti perbedaan kepentingan ekonomi, politik, sosial, keamanan, dan ketertiban yang dianggap menyentuh hal-hal prinsipil bagi masing-masing pihak.

Dalam menghadapi dan menangani konflik di masyarakat, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan yang bersifat preventif maupun represif. Kebijakan penanganan konflik dapat mencakup pendekatan dialogis, mediasi, dan rekonsiliasi yang melibatkan seluruh pihak yang bersengketa, dengan tujuan menciptakan solusi damai dan berkeadilan. Selain itu, peningkatan kapasitas lembaga penyelesaian konflik, penguatan peran aparat keamanan yang netral, serta pemberdayaan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan secara mandiri juga menjadi bagian penting dari strategi penanganan konflik. Pemerintah juga perlu mendorong integrasi nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan penghormatan terhadap keberagaman dalam pendidikan dan kehidupan sosial agar tercipta budaya damai yang berkelanjutan.

Penanganan Konflik Dan Pemulihan Pasca-Konflik Yang Berbasis Gender Equality And Social Inclusion (GESI).

Pemerintah menerapkan strategi penanganan konflik secara komprehensif dengan tahapan yang dimulai dari pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi konflik. Upaya ini dilakukan melalui penyusunan perencanaan pembangunan yang memperhatikan aspek-aspek yang berpotensi menimbulkan konflik, serta pelayanan masyarakat yang mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, dilaksanakan forum diskusi kelompok (FGD) secara rutin untuk menggali solusi atas berbagai permasalahan sosial. Peran intelijen juga dioptimalkan, antara lain dengan menempatkan anggota intel di setiap kelurahan atau desa rawan konflik, memperkuat kehadiran Bhabinkamtibmas, dan patroli dialogis untuk mengakses informasi lapangan secara langsung. Polsek juga dijadikan basis utama deteksi dini dengan dukungan komunikasi yang intensif bersama media massa dan jejaring sosial.

Ketika konflik mulai berkembang, pendekatan yang diambil bersifat bertahap, mulai dari mediasi yang melibatkan pranata adat dan sosial. Jika mediasi gagal, proses negosiasi diupayakan. Bila negosiasi juga tidak berhasil dan kekerasan mulai terjadi, maka Polri akan mengeluarkan maklumat dan melakukan penggelaran kekuatan sesuai tingkat eskalasi konflik. Dalam kondisi tertentu, back-up dari satuan wilayah maupun dari TNI dapat dimintakan, dengan tetap mematuhi tahapan prosedur penggunaan kekuatan secara terukur. Penegakan hukum juga dilakukan terhadap pelaku provokasi atau pelanggaran hukum guna mencegah eskalasi lebih lanjut dan meminimalisir korban.

Jika konflik menimbulkan korban jiwa atau luka-luka, maka langkah-langkah kemanusiaan segera dilakukan, termasuk evakuasi, identifikasi korban, pendirian posko pengaduan orang hilang, penyediaan tempat pengungsian, dan bantuan medis. Pemerintah juga menerapkan strategi pembatasan ruang gerak massa, penyekatan jalur masuk, serta pengamanan terhadap potensi konflik susulan. Edukasi terhadap masyarakat dilakukan untuk menghindari aksi balas dendam, serta penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan isu provokatif. Semua tindakan ini bertujuan untuk meredam perluasan konflik dan menjaga stabilitas wilayah yang terdampak.

Penanganan konflik tidak berhenti saat kekerasan mereda, namun dilanjutkan dengan penanganan pascakonflik. Sayangnya, penelitian menunjukkan bahwa pola penanganan pascakonflik di Jambi masih belum terstruktur, terutama dalam pendekatan berbasis Gender Equality and Social Inclusion (GESI). Meski demikian, beberapa langkah telah diambil oleh Badan Kesbangpol, seperti kegiatan rekonsiliasi melalui mediasi damai, fasilitasi restitusi, kegiatan rehabilitasi berupa pemulihan keamanan dan bakti sosial, serta rekonstruksi untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak. Di samping itu, strategi pemeliharaan perdamaian juga diterapkan melalui edukasi masyarakat, pelibatan pranata sosial, penguatan peran media, dan penegakan hukum yang adil

dan proporsional. Prinsip keadilan restoratif juga diutamakan dalam penyelesaian konflik ringan, khususnya yang melibatkan anak-anak atau lansia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi konflik antar organisasi massa (ormas) sudah mengakomodasi dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Pemerintah mengedepankan dialog, mediasi, dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan konflik secara damai, serta memperkuat kapasitas lembaga penyelesaian konflik dan meningkatkan peran aparat keamanan yang netral. Kebijakan ini sejalan dengan hasil penelitian Nugroho (2020), yang menekankan pentingnya pendekatan dialogis dan nilai-nilai toleransi sebagai dasar bagi penyelesaian konflik sosial.

Namun, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya, masih terdapat kendala dalam mewujudkan efektivitas kebijakan tersebut, terutama ketika nilai-nilai keberagaman dan toleransi belum terinternalisasi secara merata di semua kalangan masyarakat. Hal ini konsisten dengan temuan Sembiring (2017), yang menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip pluralisme, sehingga konflik antar ormas kerap terjadi akibat salah tafsir atau penolakan atas perbedaan.

Dalam konteks penanganan konflik yang lebih inklusif, hasil penelitian ini menekankan urgensi penerapan prinsip Gender Equality and Social Inclusion (GESI). Pendekatan GESI penting untuk memastikan bahwa semua kelompok, termasuk perempuan dan anak-anak, mendapatkan perlindungan dan akses setara dalam proses penyelesaian konflik. Hal ini mendukung hasil studi Dewi (2019), yang menegaskan bahwa integrasi prinsip GESI dalam kebijakan publik akan meminimalisir ketimpangan gender dan meningkatkan keadilan sosial.

Temuan lain dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam implementasi, penerapan pendekatan GESI di lapangan, khususnya di Provinsi Jambi, masih belum berjalan optimal dan terstruktur. Hal ini disebabkan keterbatasan kapasitas lembaga dan rendahnya koordinasi antar pihak terkait. Penelitian Fajar (2019) juga menemukan kendala serupa, yakni lemahnya infrastruktur dan sumber daya manusia dalam menjalankan prinsip inklusi sosial dalam program-program rehabilitasi dan reintegrasi pascakonflik.

Dalam menangani konflik yang sudah eskalatif, penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui Polri dan aparat keamanan lainnya melakukan pendekatan bertahap, mulai dari mediasi hingga penegakan hukum terhadap provokator konflik. Langkah ini sejalan dengan prinsip solidaritas organik Durkheim yang menekankan pentingnya pemulihan keadaan normal melalui koordinasi dan kerja sama antar aktor sosial. Penelitian Soeharyo (2018) mendukung hal ini dengan menyebutkan bahwa peran aparat yang netral sangat vital dalam memutus rantai kekerasan dan mendorong rekonsiliasi.

Selain upaya represif, penelitian ini juga mencatat pentingnya intervensi kemanusiaan ketika konflik menimbulkan korban jiwa atau luka-luka. Langkah-langkah seperti evakuasi, pendirian posko pengaduan, dan bantuan medis menjadi prioritas utama. Hasil ini didukung oleh penelitian Rakhmawati (2021), yang menegaskan bahwa respon cepat dan terencana sangat krusial untuk

meminimalkan dampak trauma korban dan memulihkan kepercayaan masyarakat pada negara.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa penanganan pascakonflik harus mencakup mediasi damai, rehabilitasi sosial, dan rekonstruksi infrastruktur. Meskipun demikian, di Provinsi Jambi, pelaksanaan program ini belum sepenuhnya berbasis GESI. Hal ini senada dengan temuan Yayasan Pelita Hati (2021), yang menekankan perlunya rehabilitasi berbasis psikososial dan pendidikan untuk memulihkan korban maupun pelaku, terutama perempuan dan anak-anak.

Dari aspek keadilan, hasil penelitian ini menekankan prinsip keadilan restoratif sebagai langkah penting dalam penanganan konflik ringan. Prinsip ini menjadi alternatif yang lebih manusiawi dan memulihkan hubungan sosial di masyarakat. Hal ini juga diperkuat oleh teori keadilan John Rawls yang mengedepankan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama. Penelitian Wibowo (2020) mendukung pentingnya penerapan keadilan restoratif dalam penanganan konflik di tingkat lokal.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pola penanganan konflik yang menekankan prinsip restoratif dan rehabilitatif berpotensi lebih efektif dalam membangun harmoni sosial jangka panjang. Namun, perlu penguatan kebijakan dan sinergi antara lembaga pemerintah dan masyarakat sipil. Hal ini sejalan dengan temuan Syaifuddin (2021), yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam mediasi dan rekonsiliasi untuk membangun kepercayaan dan menumbuhkan solidaritas sosial.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat literatur sebelumnya yang menyebutkan bahwa kebijakan penanganan konflik harus diarahkan pada pemulihan dan rehabilitasi, bukan sekadar represif. Dengan penerapan pendekatan GESI, penguatan kapasitas lembaga, dan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan konflik antar ormas dapat diselesaikan secara berkeadilan dan berkelanjutan. Hal ini menjadi kunci untuk menciptakan stabilitas sosial yang kondusif bagi pembangunan nasional di masa mendatang.

SIMPULAN

Kesimpulan, konflik antar organisasi massa (ormas) merupakan bentuk konflik sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan proses pembangunan, yang direspons pemerintah Indonesia melalui kebijakan penanganan konflik yang bersifat preventif dan represif, serta mengedepankan pendekatan dialogis, mediasi, dan rekonsiliasi, yang didukung oleh peningkatan kapasitas lembaga penyelesaian konflik, netralitas aparat keamanan, dan penguatan nilai-nilai toleransi serta keberagaman; dalam hal penanganan konflik berbasis Gender Equality and Social Inclusion (GESI), pemerintah telah melakukan pendekatan komprehensif dari deteksi dini hingga pemulihan pascakonflik melalui mediasi damai, rehabilitasi sosial, rekonstruksi, dan edukasi masyarakat, meskipun implementasi GESI di lapangan, seperti di Provinsi Jambi, masih belum berjalan

optimal dan memerlukan penataan lebih lanjut untuk mencapai prinsip keadilan restoratif yang diharapkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifuddin, M. (2020). Perspektif teori sosial Emile Durkheim dalam sosiologi pendidikan. *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 1-14.
- Hukumonline. (2022, Maret 25). Tujuan dan fungsi ormas. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuan-dan-fungsi-ormas-lt623d20dc2cbaa/>
- Irwandi, & Chotim, E. R. (2017). Analisis konflik antara masyarakat, pemerintah dan swasta (Studi kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISPO)*, 7(2), 161-176.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2018, September 25). Press Release: Peran Perguruan Tinggi Memasyarakatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender. Siaran Pers Nomor: B-177/Set/Rokum/Mp.01/09/2018.
- Makna Keadilan dalam Pandangan John Rawls. (2018, October 17). *Business Law*. <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>
- Setiadi, W. (2018). Penegakan hukum: Kontribusinya bagi pendidikan hukum dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 2, 1-22.
- Suryahartati, D., Windarto, Y., Yusra, D., & Yusuf, M. (2022). Analisis potensi konflik dan penanganan konflik pada organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi berbasis gender equality and social inclusion (GESI). *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(2), 15-26.
- Zainuddin, D. (2020). Analisis penanganan konflik antar organisasi kemasyarakatan di Sumatera Utara (Medan) dan Jawa Tengah (Surakarta). *Jurnal HAM*, 7(1), 16